

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

# Penyerahan APBD 2020 Molor

## Pimpinan DPRD Periode Sebelumnya Hambat Pembahasan Anggaran

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik optimis-tis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menerima penyerahan APBD DKI pada pertengahan Desember, meskipun melebihi tenggat waktu yang ditentukan, yaitu 30 November 2019.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, DPRD DKI bahkan telah mengirimkan surat permohonan untuk perpanjangan waktu pengumpulan RAPBD DKI 2020. "Insya Allah pasti, dulu juga bisa begitu kita kan sampai tanggal 15 (Desember-red)," ujar Taufik kepada INDOPOS di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2019) lalu.

Dia mengaku, terjadinya perpanjangan waktu yang dibutuhkan untuk pembahasan APBD DKI karena pada saat pengajuan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 terjadi bersamaan dengan APBD Perubahan 2019. "Kami (DPRD DKI 2014-2019-red) sepakat untuk bahas dulu APBD Perubahan supaya nyambung nih. Kan perubahan ujungnya adalah awal dari APBD berikutnya," kata Taufik.

Selain itu, lanjut Taufik, tugas pembahasan KUA-PPAS diserahkan pada DPRD DKI 2019-2024 yang baru bertugas usai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) rampung pada akhir Oktober 2019. Karena itu, Ia mengatakan, DPRD DKI optimis bahwa Kemendagri akan menerima permintaan perpanjangan waktu APBD DKI 2020 dengan

latar belakang kondisi tersebut.

Taufik menambahkan, DPRD DKI bersama para pejabat Pemprov DKI akan melakukan Rapat Badan Anggaran untuk menetapkan KUA-PPAS 2020 pada pekan depan. Dalam pembahasan Banggar nantinya DPRD DKI dan Pemprov DKI akan melakukan penyisiran terakhir untuk APBD 2020 yang diperkirakan defisit sebanyak Rp10 triliun.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah membenarkan APBD DKI tahun 2020 masih mengalami defisit hingga Rp10 triliun. "Jadi rencana pendapatan kita di 2020 yang akan datang tadi berdasarkan rapat-rapat Komisi itu terungkap angka Rp97 triliun. Tapi kemampuan keuangan daerah kita, setelah kita hitung, itu ada di Rp87 triliun sekian-sekian. Jadi masih ada selisih Rp10 triliun," ucap dia di lokasi yang sama.

Adanya defisit Rp10 triliun, Saefullah mengimbau, adanya pengurangan usulan anggaran belanja daerah. Sehingga perlu dipilih mana anggaran belanja yang menjadi prioritas. Ia menyebutkan beberapa usulan anggaran belanja yang bisa dijadikan prioritas adalah program wajib, seperti pendidikan dan kesehatan.

"Bagaimana mengurangi yang 10 itu, mana yang harus dihapus, mana yang dikurangi, mana yang merupakan prioritas Nasional, mana yang merupakan prioritas daerah, mana yang merupakan program wajib," papar dia.

Di sisi lain, Ketua DPD Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) DKI Jakarta Agus Firmansyah berpendapat, keterlambatan pembahasan APBD di antaranya lantaran

kelalaian pimpinan dewan periode sebelumnya. "Ini kesalahan pimpinan DPRD periode sebelumnya," tegas dia di Jakarta, Kamis (21/11/2019).

Pasalnya, sambung Agus, menurut pengakuan Sekda DKI Saefullah bahwa dokumen itu sudah dikirim sejak 5 Juli 2019. Sayangnya, dokumen itu mengendap cukup lama tanpa dilirik sedikitpun oleh anggota dewan karena tengah sibuk menghadapi Pemilu 2019.

"Seharusnya pimpinan dewan periode 2014-2019 menyerahkan dokumen pada Agustus 2019 kepada dewan periode 2019-2024 pada Agustus lalu (saat pelantikan-red). Pimpinan dewan sementara ketika itu bisa menerima dokumen agar bisa baca dan dipelajari oleh anggota dewan yang baru, walaupun belum terbentuk AKD (alat kelengkapan dewan)," papar Agus.

Semestinya, kata Agus, adanya temuan kejanggalan anggaran sudah bisa diminimalisasi sejak awal oleh anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. "Pimpinan lama tidak menyerahkan dokumen ke pimpinan sementara periode baru. Sebaliknya, pimpinan sementara tidak menagih dokumen dari yang lama. Ini ada apa," tanya dia.

Karena itu, kata Agus, berbagai kritik yang muncul dari anggota dewan saat ini tidak bisa dijadikan alasan keterlambatan APBD 2020. "Kritik itu sudah jadi tugas dewan. Gak bisa dianggap menghambat pembahasan. Justru pimpinan dewan yang lama dan pimpinan dewan sementara yang bisa terkesan membuat lamban pembahasan anggaran. Sebab anggota dewan yang baru tak punya cukup waktu untuk membahasnya," pungkas dia. (aen/rul)